



Jurnal Ekonomika

Journal homepage: www.jurnal.borneo.ac.id/index.php/ekonomika

ISSN 2086-3233 E-ISSN 2685-2977

Transformasi Paradigma Fiskal Indonesia dalam Konteks Pembangunan dan Kemandirian Nasional

Fitriani^{a*}, Herry Yulistiyono^b, Ariani^c

^a Universitas PGRI Yogyakarta, profitriani@upy.ac.id

^b Universitas Trunojoyo Madura, herry.yulistiyono@trunojoyo.ac.id

^c Universitas Borneo Tarakan, ariyanitinsee@gmail.com

*Corresponding Author: profitriani@upy.ac.id

INFO ARTIKEL

Keywords:

Fiscal Policy;
Development Sovereignty;
Fiscal Sustainability;
Inclusive growth

Kata Kunci:

Kebijakan Fiskal;
Kedaulatan Pembangunan,
Keberlanjutan Fiskal,
Pertumbuhan Inklusif

ABSTRACT

This study examines the transformation of Indonesia's fiscal policy direction during the 2024–2026 period in the post COVID-19 transition phase. This shift reflects a paradigm change from a counter-cyclical recovery policy toward fiscal governance oriented toward national development and sovereignty. The research employs a qualitative descriptive and comparative approach through document analysis of Informasi APBN 2024–2025 and the 2026 Draft State Budget (RAPBN) issued by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. The findings reveal a structural transformation in fiscal policy, marked by maintaining the deficit below 3 percent of GDP, implementing tax reform and digitalization, and reallocating public expenditure toward productive sectors such as education, health, green energy, and food security. Based on Musgrave's (1959) theory, fiscal functions evolved from stabilizing to allocative and distributive. The results indicate growing maturity in adaptive fiscal governance. This study contributes empirically to the literature on fiscal governance in developing countries.

ABSTRAK

Penelitian ini menelaah transformasi arah kebijakan fiskal Indonesia periode 2024–2026 dalam masa transisi pasca-pandemi COVID-19. Pergeseran ini mencerminkan perubahan paradigma dari kebijakan pemulihan *counter-cyclical* menuju tata kelola fiskal yang berorientasi pada pembangunan dan kedaulatan nasional. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif komparatif melalui analisis dokumen *Informasi APBN* 2024–2025 dan *RAPBN* 2026 yang diterbitkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan transformasi struktural kebijakan fiskal yang ditandai oleh disiplin defisit di bawah 3 persen PDB, reformasi dan digitalisasi perpajakan, serta

pergeseran belanja publik ke sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, energi hijau, dan ketahanan pangan. Berdasarkan teori Musgrave (1959), fungsi fiskal berevolusi dari stabilisatif ke alokatif dan distributif. Temuan ini menegaskan kematangan tata kelola fiskal adaptif yang menyeimbangkan stabilitas makro, pembangunan berkelanjutan, dan kemandirian ekonomi. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris bagi penguatan literatur tentang tata kelola fiskal di negara berkembang.

PENDAHULUAN

Lanskap ekonomi global pasca-pandemi COVID-19 masih diwarnai oleh ketidakpastian akibat dinamika geopolitik, disrupsi rantai pasok, serta fragmentasi perdagangan internasional yang menekan stabilitas makroekonomi global (Gayathri et al., 2024; Yoganandham, 2024). International Monetary Fund (IMF) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi global dalam dua tahun terakhir hanya berkisar 3,0–3,1 persen, mencerminkan pemulihan yang belum merata dan meningkatnya tekanan struktural terhadap sistem perdagangan multilateral (Luong et al., 2025). Dalam konteks ini, kebijakan fiskal kembali menempati posisi sentral sebagai instrumen utama negara untuk menjaga ketahanan ekonomi, melindungi kelompok rentan, serta mendorong pertumbuhan jangka menengah melalui belanja publik yang produktif (Ekasari et al., 2025; Touat, 2024).

Indonesia, sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20, menghadapi tantangan serupa untuk menyeimbangkan antara stabilitas fiskal dan percepatan pembangunan ekonomi (Anugrah et al., 2024; Indrawati et al., 2024; Ulani & Aprirachman, 2025). Selama periode krisis COVID-19, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbukti berfungsi efektif sebagai *shock absorber* dalam menjaga daya beli masyarakat dan menopang pemulihan ekonomi nasional (Kacaribu & Crystallin, 2025). Namun, memasuki fase pasca-pandemi, peran APBN mengalami reposisi strategis dari instrumen stabilisasi jangka pendek menuju instrumen pembangunan berkelanjutan yang lebih struktural (Indrawati et al., 2024; Judijanto & Muthalib, 2025).

Reposisi tersebut ditandai dengan kembalinya disiplin fiskal melalui pengendalian defisit anggaran di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sejalan dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara (Khairi, 2024). Pada saat yang sama, arah kebijakan fiskal diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja produktif di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan energi terbarukan guna memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Gamal et al., 2024; Mahira & Karjoko, 2024; Trisnantoro, 2022). Pendekatan ini mencerminkan strategi *expansionary yet prudent fiscal policy*, di mana ekspansi fiskal tetap dilakukan secara terukur untuk mendukung

transformasi ekonomi nasional.

Periode 2024–2026 menjadi fase transisi krusial dalam konsolidasi fiskal Indonesia, yang menandai peralihan dari kebijakan penanganan krisis menuju pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Literatur ekonomi menyebut fase pasca-krisis ini sebagai *windows of restructuring*, yaitu momentum bagi negara untuk mengalihkan kebijakan fiskal dari stimulus siklikal menuju reformasi fiskal struktural yang lebih permanen (An, 2022; O'Reilly et al., 2020). Studi komparatif di kawasan Asia menunjukkan bahwa fase pasca-pandemi merupakan periode strategis bagi negara berkembang untuk menata ulang prioritas fiskal menuju transformasi hijau, digitalisasi, dan penguatan sistem perlindungan sosial sebagai fondasi pertumbuhan inklusif (Abdullah et al., 2023; Go et al., 2024).

Dalam konteks Indonesia, fase transisi 2024–2026 memiliki bobot strategis karena bertepatan dengan berakhirnya *extraordinary fiscal measures* era pandemi, pemulihan disiplin defisit, serta penyelarasan APBN dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Tema APBN 2024 hingga RAPBN 2026 mencerminkan evolusi orientasi kebijakan fiskal dari pemulihan menuju transformasi struktural. APBN 2024 menekankan percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, APBN 2025 mengarah pada akselerasi kualitas pertumbuhan dan ekonomi hijau, sementara RAPBN 2026 menegaskan agenda kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi sebagai pilar kemandirian nasional (Kacaribu & Crystallin, 2025).

Perubahan tematik tersebut mencerminkan pergeseran paradigma kebijakan fiskal Indonesia dari pendekatan *counter-cyclical* menuju *developmental and sovereignty-oriented fiscal policy*, di mana negara tidak lagi berperan semata sebagai stabilisator makroekonomi, tetapi sebagai aktor utama transformasi struktural dan penguatan kemandirian ekonomi nasional (Indrawati et al., 2024; Judijanto, 2025). Pendekatan ini selaras dengan agenda Visi Indonesia Emas 2045 yang menempatkan pembangunan manusia unggul, penguasaan sumber daya strategis, dan kedaulatan ekonomi sebagai pilar pembangunan jangka panjang.

Meskipun sejumlah studi telah membahas peran APBN dalam pemulihan ekonomi selama pandemi, kajian yang secara khusus menelaah pergeseran paradigma kebijakan fiskal Indonesia pada periode pasca-pandemi, khususnya 2024–2026, masih terbatas. Sebagian besar penelitian berfokus pada efektivitas stimulus fiskal atau reformasi perpajakan, tanpa mengulas secara mendalam transformasi orientasi kebijakan fiskal dalam kerangka pembangunan berdaulat dan berkelanjutan (Patra, 2025; Pulipaka et al., 2023). Celah literatur ini menunjukkan adanya *research gap* dalam diskursus mengenai evolusi kebijakan fiskal Indonesia pasca-krisis global.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola perubahan arah kebijakan fiskal Indonesia pada periode 2024–2026 melalui

analisis deskriptif-komparatif terhadap dokumen resmi *APBN* dan *RAPBN* yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Analisis tidak hanya berfokus pada aspek oke ini sudah menjadstruktural anggaran, tetapi juga menelaah narasi tematik dan orientasi kebijakan fiskal yang mencerminkan pergeseran paradigma dari *counter-cyclical* menuju *developmental and sovereignty-oriented fiscal policy*.

KAJIAN PUSTAKA

Pandemi COVID-19 telah menjadi *inflection point* dalam tata kelola ekonomi global dan nasional yang mendorong perubahan mendasar dalam paradigma kebijakan fiskal (Chohan, 2020). Di Indonesia, krisis pandemi mempercepat reposisi kebijakan fiskal dari fungsi tradisionalnya sebagai *counter-cyclical stabilizer* menuju instrumen transformasi struktural dan penguatan ketahanan nasional (Ramesh, 2025). Dalam konteks pasca-pandemi, kebijakan fiskal tidak lagi semata ditujukan untuk meredam gejolak ekonomi jangka pendek, tetapi diarahkan untuk membangun fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan melalui *inclusive recovery*, ketahanan sosial, dan transisi menuju ekonomi hijau (UN ESCAP, 2025).

Literatur regional menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan inklusivitas pertumbuhan dengan disiplin fiskal di tengah agenda dekarbonisasi dan adaptasi perubahan iklim (Weber et al., 2022). Oleh karena itu, *sustainable fiscal management* menjadi prasyarat utama bagi stabilitas ekonomi jangka panjang di era pasca-pandemi. Dalam kerangka ini, paradigma fiskal Indonesia bergeser menuju upaya pembentukan kedaulatan fiskal (*fiscal sovereignty*) melalui diversifikasi sumber pendapatan, peningkatan efisiensi belanja, serta penguatan kapasitas institusional fiskal.

Transformasi arah kebijakan fiskal Indonesia pada periode 2024–2026 mencerminkan pergeseran dari rezim penanganan krisis menuju *developmental and sovereignty-oriented fiscal policy*. Konsolidasi fiskal tidak hanya diarahkan pada pengendalian defisit, tetapi juga pada *structural upgrading*, investasi hijau, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai basis pembangunan jangka panjang. Dalam perspektif politik-ekonomi, APBN berfungsi sebagai instrumen strategis negara untuk memperkuat legitimasi pembangunan, kemandirian ekonomi, dan daya tahan fiskal nasional (Hafel & Ibrahim, 2024; Judijanto & Muthalib, 2025).

Beberapa studi menempatkan Indonesia sebagai *Asian developmental power* yang berupaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan penguasaan sumber daya strategis di tengah fragmentasi arsitektur ekonomi global (Dorigné-Thomson, 2023a). Dalam konteks ini, *developmental and sovereignty-oriented fiscal policy* merefleksikan kemampuan negara mempertahankan otonomi fiskal sekaligus

membangun kontrak sosial fiskal yang lebih adil. Konsep *fair fiscal contract* menekankan pentingnya keseimbangan antara redistribusi sosial dan efisiensi ekonomi sebagai basis legitimasi fiskal pemerintah (Hujo & Fuentes-Nieva, 2024).

Kajian empiris menunjukkan bahwa periode 2024–2026 menjadi masa krusial bagi konsolidasi dan inovasi fiskal Indonesia. Transformasi fiskal di Indonesia merupakan respons adaptif terhadap tekanan global dan kebutuhan internal untuk memperkuat *inclusive growth* (Crystallin, 2022). Negara-negara ASEAN mulai mengembangkan *adaptive fiscal strategies* dengan mengintegrasikan fungsi stabilisasi dan transformasi sosial dalam kebijakan fiskal pasca-pandemi (Weber et al., 2022).

Namun demikian, Sebagian besar penelitian terdahulu masih bersifat parsial. Studi Indrawati et al., (2024) dan Judijanto, (2025) misalnya berfokus pada efektivitas kebijakan fiskal selama pandemi, tetapi belum mengulas secara sistematis evolusi peran APBN sebagai instrumen pembangunan berdaulat pada fase pasca-pandemi. Studi lain, menyoroti pentingnya perluasan *fiscal space* melalui inovasi pembiayaan dan penguatan kapasitas fiskal di negara berkembang (Grabel, 2024; Hujo & Fuentes-Nieva, 2024) Namun, belum mengaitkannya secara konkret dengan implementasi kebijakan fiskal Indonesia dalam kerangka *Visi Indonesia Emas 2045*.

Beberapa penelitian lainnya membahas reformasi perpajakan (Putri & Najicha, 2021; Supriadi, 2024) kebijakan perlindungan sosial (Ela, 2025; UN ESCAP, 2025) serta penguatan fiskal daerah (Afkar et al., 2020) juga masih cenderung terfragmentasi dan belum mengkaji perubahan naratif serta ideologis APBN dari pendekatan *counter-cyclical response* menuju *developmental and sovereignty-oriented fiscal policy*. Selain itu, pendekatan berbasis analisis dokumen APBN secara longitudinal yang menelaah narasi tematik dan arsitektur kebijakan fiskal masih relatif jarang digunakan dalam literatur fiskal nasional, meskipun telah menjadi praktik umum dalam analisis kebijakan publik internasional (Idrus, 2024; Prayoga, 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, *research gap* yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah absennya kajian yang memadukan pendekatan deskriptif-komparatif berbasis dokumen fiskal (Informasi APBN dan RAPBN) dengan kerangka teori fiskal pembangunan dan kedaulatan negara. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menelaah arah kebijakan fiskal Indonesia periode 2024–2026 sebagai manifestasi transformasi paradigma fiskal menuju model pembangunan yang berdaulat, adaptif, dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan desain komparatif untuk mengidentifikasi dan menjelaskan pola perubahan arah kebijakan

fiskal nasional Indonesia pada periode 2024–2026. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap dokumen kebijakan yang tidak hanya mencerminkan struktur dan alokasi anggaran, tetapi juga memuat narasi kebijakan, orientasi pembangunan, serta kerangka ideologis yang melandasinya.

Metode analisis yang digunakan adalah *policy content analysis* terhadap dokumen resmi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rencana APBN (RAPBN) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Analisis dilakukan melalui pembacaan sistematis terhadap bagian pendahuluan, ringkasan eksekutif, dan kebijakan utama untuk mengidentifikasi tema strategis, prioritas belanja, serta arah kebijakan fiskal setiap tahun.

Desain komparatif diterapkan secara longitudinal dengan membandingkan dokumen APBN 2024, APBN 2025, dan RAPBN 2026 guna menilai konsistensi, pergeseran fokus, dan perubahan orientasi kebijakan fiskal antar tahun. Analisis ini diarahkan untuk mengidentifikasi transisi paradigma kebijakan fiskal dari pendekatan *counter-cyclical* menuju *developmental and sovereignty-oriented fiscal policy*, serta keterkaitannya dengan kerangka pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN 2025–2045).

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi pemerintah, khususnya publikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Anggaran. Dokumen utama yang dianalisis meliputi Informasi APBN 2024, Informasi APBN 2025, Siaran Pers RAPBN 2026, serta Nota Keuangan dan Pidato Menteri Keuangan. Seluruh data bersifat terbuka dan dapat diverifikasi melalui situs resmi Kementerian Keuangan, sehingga memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi sebagai data kebijakan publik. Untuk memperjelas cakupan data yang dikaji, berikut disajikan Tabel 1 sebagai rangkuman:

Tabel 1. Sumber dan Jenis Informasi yang dikaji dalam Dokumen APBN 2024-2026	
Dokumen	Jenis Informasi yang Diambil
Informasi APBN 2024	Struktur pendapatan dan belanja; defisit; prioritas pembangunan nasional 2024; tema dan narasi kebijakan fiskal tahun 2024
Informasi APBN 2025	Perubahan komposisi belanja; arah kebijakan fiskal 2025; reformasi perpajakan; pembangunan SDM; transisi energi; investasi produktif
Siaran Pers RAPBN 2026	Tema kedaulatan ekonomi; strategi pembiayaan; kebijakan bioenergi dan pangan; narasi kemandirian fiskal dan ketahanan strategis nasional
Nota Keuangan & Pidato Menteri	Justifikasi kebijakan; argumentasi politik fiskal; penyampaian arah kebijakan jangka menengah; koneksi dengan Visi Indonesia Emas 2045

Sumber: Penulis, 2025

Unit analisis mencakup empat dimensi utama APBN, yaitu: (1) pendapatan negara, (2) belanja negara, (3) defisit dan pembiayaan anggaran, serta (4) prioritas dan fokus tematik kebijakan fiskal. Keempat dimensi tersebut dianalisis untuk mengungkap rasionalitas fiskal, logika kebijakan, dan konsistensinya dengan agenda pembangunan nasional jangka panjang, khususnya Visi Indonesia Emas 2045 (Putra & Satria, 2025; UN ESCAP, 2025).

Prosedur Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu: (1) reduksi data berupa ekstraksi informasi kuantitatif dan kualitatif dari dokumen APBN; (2) kategorisasi tematik berdasarkan fungsi fiskal alokatif, distributif, dan stabilisatif dan (3) analisis komparatif longitudinal untuk mengidentifikasi pola evolusi kebijakan dan transformasi paradigma fiskal nasional. Kerangka analisis mengacu pada konsep *fair fiscal contract* Hujo & Fuentes-Nieva, (2024) mengenai *fair fiscal contracts* dan tentang *expanding fiscal space* dalam konteks ekonomi berkembang (Grabel, 2024)

Validitas dan Teknik Analisis

Keabsahan analisis dijaga melalui triangulasi sumber dan konsep dengan membandingkan isi antar-dokumen APBN, Nota Keuangan, dan pernyataan resmi pemerintah, serta mengaitkan temuan empiris dengan teori kebijakan fiskal berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi kedaulatan. Analisis bersifat deskriptif-interpretatif, menekankan pada pemaknaan naratif dan ideologis kebijakan fiskal, sementara data kuantitatif digunakan untuk mendukung pembacaan tren struktural dan konsistensi kebijakan antar tahun.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap dokumen *Informasi APBN 2024–2025* dan *RAPBN 2026* menunjukkan adanya pola evolusi yang konsisten dalam arah kebijakan fiskal nasional. Pemerintah secara bertahap menggeser orientasi kebijakan dari fungsi *counter-cyclical* yang dominan selama krisis COVID-19 menuju peran yang lebih *developmental* dan *strategis* (Ramesh, 2025). Pergeseran ini tercermin jelas dalam tema APBN yang berkembang secara bertahap: APBN 2024 berfokus pada konsolidasi dan stabilisasi pasca-krisis, APBN 2025 menekankan akselerasi pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan, sementara RAPBN 2026 menandai konsolidasi kebijakan menuju kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi nasional (Dorigné-Thomson, 2023; Yang & Weiguang, 2025).

Konsistensi tematik tersebut mencerminkan transformasi tata kelola fiskal dari negara yang reaktif terhadap krisis menuju negara yang proaktif dalam membangun

kapasitas produktif dan ketahanan ekonomi jangka panjang. APBN 2024 menjadi titik balik dari rezim kebijakan fiskal darurat menuju kerangka pembangunan berimbang, ditandai dengan pemulihan disiplin fiskal dan pengendalian defisit di bawah 3 persen PDB. Pendekatan ini menciptakan *fiscal credibility* baru, di mana prinsip kehati-hatian fiskal berjalan seiring dengan belanja pembangunan yang produktif, sejalan dengan konsep *developmental fiscal state* (Grabel, 2024; Hujo & Fuentes-Nieva, 2024).

Dari sisi pendapatan negara, tren peningkatan penerimaan selama periode 2024–2026 mencerminkan keberhasilan reformasi mobilisasi pendapatan pasca implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Peningkatan penerimaan pajak dan stabilitas PNBP menunjukkan upaya pemerintah memperluas basis fiskal tanpa mengorbankan iklim investasi, sejalan dengan strategi *broadening tax base* dan prinsip *inclusive fiscal policy* (Mpofu, 2023). Reorientasi PNBP juga mencerminkan pergeseran dari ketergantungan komoditas primer menuju pengelolaan sumber daya berbasis nilai tambah melalui kebijakan hilirisasi dan transisi energi, yang mendukung agenda pembangunan berkelanjutan dan kemandirian ekonomi nasional.

Dari sisi belanja negara, PBN 2024–2026 menunjukkan pola *reallocation for productivity*, yakni pergeseran dari belanja konsumtif menuju belanja strategis yang berorientasi pada produktivitas jangka panjang. Peningkatan alokasi pada sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, dan energi memperkuat transformasi APBN menjadi *social investment budget*. Kebijakan ini mencerminkan penerapan *productive fiscal stimulus*, di mana belanja publik diarahkan untuk membangun kapasitas manusia, mengurangi ketimpangan sosial, dan memperluas basis pertumbuhan ekonomi nasional (Darmawan et al., 2024). Kebijakan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan *learning outcomes*, kesiapan digital, dan literasi finansial sebagai bagian dari strategi *human capital competitiveness* menghadapi transformasi teknologi global (Yang & Weiguang, 2025). Sementara itu, peningkatan belanja kesehatan mencerminkan komitmen terhadap *health system resilience*, dengan fokus pada transformasi layanan primer, penguatan sistem pembiayaan JKN, dan percepatan penurunan stunting hingga target 14 persen pada 2024, sejalan dengan agenda *Indonesia Health Transformation Blueprint 2024–2026* Kementerian Kesehatan (Kemenkes, 2024; UN ESCAP, 2025). Dengan demikian, belanja sosial dalam APBN berfungsi ganda: sebagai instrumen fiskal stabilisasi jangka pendek dan strategi pembangunan manusia jangka panjang, yang memperkuat fondasi ekonomi berkelanjutan dan berdaya saing global.

Kebijakan perlindungan sosial Indonesia menunjukkan evolusi signifikan dari sekadar program kompensasi menuju model berbasis pemberdayaan (*empowerment-based social protection*). Anggaran perlindungan sosial yang mencapai Rp508,2 triliun dalam RAPBN 2026 tidak hanya memperluas jangkauan bantuan tunai dan subsidi, tetapi juga mengintegrasikan dimensi pemberdayaan ekonomi, seperti akses

permodalan produktif, pelatihan kewirausahaan, dan integrasi dengan ekosistem UMKM digital. Pendekatan ini mencerminkan implementasi teori *inclusive growth*, di mana perlindungan sosial diposisikan sebagai katalis pembangunan ekonomi partisipatif, bukan sekadar instrumen redistribusi pendapatan (Hujo & Fuentes-Nieva, 2024; Weber, 2025).

Secara konseptual, fungsi distributif fiskal di sini bergeser dari *redistributive* ke *productive distributive function* karena belanja sosial diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan resiliensi ekonomi kelompok miskin dan rentan. Reformulasi ini selaras dengan temuan UN ESCAP (2025) yang menilai kebijakan sosial berbasis pemberdayaan sebagai ciri utama *transformative fiscal policy* di kawasan Asia-Pasifik. Lebih lanjut, integrasi program sosial seperti *Kartu Prakerja*, *Program Keluarga Harapan (PKH)*, dan *Mekaar* menjadi bukti sinergi lintas sektor dalam mewujudkan *social protection as investment* (Wahyudi et al., 2024). Dengan demikian, APBN tidak hanya berfungsi sebagai alat fiskal stabilisasi, tetapi juga mekanisme pembangunan kapasitas manusia yang inklusif dan berkelanjutan.

Dari perspektif pembiayaan dan defisit anggaran, pemerintah menerapkan prinsip *sustainable fiscal expansion*, dengan menjaga defisit anggaran secara konsisten di bawah 3 persen PDB dan mengoptimalkan skema pembiayaan inovatif, seperti KPBU, pemanfaatan SAL, serta peran BLU dan *special mission vehicle*. Strategi ini memperluas ruang fiskal tanpa meningkatkan risiko utang, serta memperkuat kemandirian pembiayaan pembangunan, sejalan dengan konsep *fiscal sovereignty* dan *endogenous fiscal autonomy* (Gabel, 2024; Ramesh 2025)

Analisis tematik menunjukkan adanya pergeseran narasi kebijakan fiskal dari *stabilization discourse* menuju *sovereignty discourse*. Tema APBN 2024 menekankan stabilitas dan perlindungan sosial, APBN 2025 mengarah pada reformasi dan akselerasi pertumbuhan, sementara RAPBN 2026 menegaskan kebijakan fiskal sebagai instrumen politik-ekonomi untuk memperkuat kemandirian nasional. Pergeseran ini menandai lahirnya praktik *fiscal statecraft* di Indonesia, di mana APBN berfungsi tidak hanya sebagai instrumen teknokratis, tetapi sebagai alat strategis pembangunan dan kedaulatan ekonomi (Putra & Satria, 2025)

Hasil analisis ini menggambarkan pergeseran dominasi fungsi fiskal yang dinamis sepanjang periode 2024–2026. Tahun 2024 didominasi oleh fungsi stabilisatif, di mana kebijakan fiskal diarahkan untuk menahan tekanan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat melalui instrumen kompensasi dan pengendalian harga. Tahun 2025 menonjolkan fungsi alokatif, dengan fokus pada efisiensi dan produktivitas belanja publik di sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur digital. Sementara itu, *RAPBN 2026* menandai penguatan fungsi distributif melalui ekspansi program perlindungan sosial dan kebijakan pembangunan berdaulat berbasis kemandirian energi-pangan. Pergeseran bertahap ini menunjukkan kematangan siklus

kebijakan fiskal Indonesia, yang adaptif terhadap tantangan jangka pendek namun tetap berorientasi pada transformasi struktural jangka panjang. Pola ini sejalan dengan kerangka teori *new developmentalism* yang menekankan peran aktif negara sebagai arsitek pembangunan, bukan sekadar regulator pasif. Seperti dijelaskan oleh Grabel (2024) dan Ramesh (2025), model fiskal seperti ini memperkuat kedaulatan ekonomi melalui kebijakan yang menjaga stabilitas makro sekaligus menumbuhkan kapasitas produktif domestik (*structural competitiveness*). Dengan demikian, fungsi-fungsi fiskal Musgrave kini saling terintegrasi secara progresif, menandai pergeseran Indonesia menuju fase *adaptive fiscal governance*.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Indonesia periode 2024–2026 mengalami transformasi struktural dan ideologis yang signifikan. APBN berevolusi dari instrumen respons krisis menjadi kerangka pembangunan berdaulat yang mengintegrasikan disiplin fiskal, keberlanjutan sosial, dan nasionalisme ekonomi. Pergeseran ini mencerminkan kematangan tata kelola fiskal Indonesia (*fiscal governance maturity*), di mana negara mampu menyeimbangkan stabilitas makroekonomi, keadilan sosial, dan kemandirian ekonomi di tengah tekanan global dan transisi politik domestik (Hujo & Fuentes-Nieva 2024; UN ESCAP, 2025)

Secara keseluruhan, hasil analisis temuan dan analisis longitudinal terhadap dokumen APBN 2024, 2025, dan RAPBN 2026, dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan fiskal Indonesia mengalami transformasi struktural dan ideologis yang signifikan, bergerak dari respons jangka pendek terhadap krisis menuju model pembangunan berdaulat yang menyeluruh. APBN tidak lagi sekadar berfungsi sebagai alat stabilisasi, tetapi telah berevolusi menjadi instrumen pembangunan multidimensi yang mengintegrasikan efisiensi fiskal, keberlanjutan sosial, dan nasionalisme ekonomi.

Temuan ini secara langsung menjawab tujuan penelitian, yaitu mengidentifikasi pola perubahan arah kebijakan fiskal Indonesia dari pendekatan *counter-cyclical* menuju *developmental and sovereignty-oriented fiscal governance*. Model ini menempatkan kebijakan fiskal sebagai instrumen strategis pembangunan nasional dan dapat menjadi rujukan bagi negara berkembang lain yang menghadapi tantangan serupa dalam era pasca-globalisasi.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan fiskal Indonesia periode 2024–2026 mengalami transformasi struktural dan paradigmatic signifikan, beralih dari *counter-cyclical recovery policy* menuju kerangka *developmental and*

sovereignty-oriented fiscal policy. Pergeseran ini tercermin dalam konsistensi pengendalian deficit anggaran di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto, penguatan reformasi dan digitalisasi perpajakan, serta reorientasi belanja negara menuju sektor-sektor strategis yang mendukung pembangunan manusia, transisi energi, dan ketahanan pangan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Analisis berfokus pada dokumen fiskal makro dan belum mencakup implementasi kebijakan di tingkat sektoral maupun daerah. Selain itu, pendekatan kualitatif berbasis dokumen tidak memungkinkan pengukuran dampak kuantitatif kebijakan fiskal terhadap indikator pembangunan seperti kemiskinan, ketimpangan, atau pertumbuhan hijau. Periode observasi yang terbatas pada tiga tahun fiskal juga membatasi kemampuan penelitian untuk menangkap dinamika jangka menengah dalam konteks transisi pemerintahan dan perubahan lingkungan global.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan kualitatif dengan metode kuantitatif, seperti *computable general equilibrium* (CGE) atau *fiscal impact modeling*, guna mengukur dampak spesifik kebijakan fiskal terhadap indikator ekonomi dan sosial. Selain itu, penguatan agenda reformasi fiskal yang adaptif meliputi peningkatan kepatuhan pajak, pengembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berkelanjutan, serta integrasi *result-based budgeting* dengan agenda pembangunan hijau dan inklusif perlu terus dilanjutkan agar kebijakan fiskal Indonesia semakin berperan sebagai pilar utama pembangunan yang berdaulat, berkelanjutan, dan responsif terhadap dinamika global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., Warviyan, D., Safrina, R., Utama, N. A., Tirta, A., Veza, I., & Irianto, I. (2023). Green Fiscal Stimulus in Indonesia and Vietnam: A Reality Check of Two Emerging Economies. *Sustainability*, 15(3), 2174. <https://doi.org/10.3390/su15032174>
- Afkar, javier Luque, shinsaku., Nomura., jeffery Marshall, R. (2020).8. 14 *THIS Report Was Prepared By*. www.worldbank.org
- An, S. (2022). Changes, Challenges and Implications of Fiscal and Monetary Policy Directions in the Post Pandemic Era. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4055194>
- Anugrah, D. F., Harun, C. A., Rahmawati, D., Ardiyono, S. K., & Imron, H. J. (2024). *Measuring Export Diversification Strategies Amid Global Geo-Economic Fragmentation*. (No. WP/06/2024).
- Bondarenco, A. (2025). The relationship between financial policy and the state budget. *Simpozion Științific al Tinerilor Cercetători. Ediția a 22-a. Culegere de Lucrări Științifice. Vol 1*, 305–309. <https://doi.org/10.53486/sstc2024.v1.68>
- Cahya, Dwi R. F., Hamimi, T. S., Reza Rahardian, M. P., & Muksin, A. (2024). *Zona Law And Public Admnistration Indonesia (Zlpai) Volume 2 Issue 3 (2024) The Function Of*

- The State Revenue And Expenditure Budget Stabilizer In Supporting Development*. <https://ejournal.zona-edu.org/index.php/ZLPAI/index>
- Cepparulo, A., & Mourre, G. (2022). Fiscal policies-growth connection: which role for the budget composition? *Applied Economics Letters*, 29(14), 1292–1299. <https://doi.org/10.1080/13504851.2021.1927954>
- Chohan, U. W. (2020). A Post-Coronavirus World: 7 Points of Discussion for a New Political Economy. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3557738>
- Crystallin, M. (2022). Walking a Thin Line. In *COVID-19 in Indonesia* (pp. 71–100). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003243670-4>
- Darmawan, I. G. N., Suryadi, A., Budimansyah, D., & Susilo, S. (2024). *Indonesian Education*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781032657400>
- Debabrata Patra, M. (2025). *Testimonials of Tumultuous Times*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003613886>
- Dorigné-Thomson, C. (2023). Indonesian Foreign Policy's Contemporary Evolution. In *Indonesia's Engagement with Africa* (pp. 67–127). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-981-99-6651-6_2
- Ela, N. (2025). *Indonesia's 2026 Green Budget Reform: Balancing Carbon Neutrality and Social Welfare* (Vol. 3, Issue 1).
- Gamal, A., Ayu Wijayanti, N., Paramita Budi Utami, S., Khoirunisa, R., Kamila, N., Ahmad Gamal, L., Rohmah, L., Mushfiroh, A., Amalia, R., Jang Rohmah, H., & Jang, H. (2024). *SHARE HEIGHTS-FS (Higher Education Institutions Generating Holistic & Transferable Solutions-Financial Sustainability) Indonesia*. <https://doi.org/10.7274/rx913n23r39>
- Gayathri, R., Vijayabanu, C., & Theresa, C. (2024). Economic Disruption and Global Obscurity – Insights and Challenges. In *Economic Uncertainty in the Post-Pandemic Era* (pp. 1–26). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003461074>
- Go, E., Hill, S., Jaber, M. H., Jinjark, Y., Park, D., & Ragos, A. (2024). Developing Asia's fiscal landscape and challenges. *Asian-Pacific Economic Literature*, 38(1), 225–258. <https://doi.org/10.1111/apel.12412>
- Gabel, I. (2024). *Expanding, Creating, and Engendering Fiscal Space: Strategies Toward External Debt, Concessional Finance, and Special Drawing Rights*. <https://www.unwomen.org/sites/default/files/2023-12/Feminist->
- Hafel, M., & Ibrahim, A. H. H. (2024). Budget politics in Indonesia. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 11(4), 159–168. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v11n4.2457>
- Halimanjaya, A. (2019). The Political Economy of Indonesia's Renewable Energy Sector and Its Fiscal Policy Gap. *International Journal of Economics, Finance and Management Sciences*, 7(2), 45. <https://doi.org/10.11648/j.ijefm.20190702.12>
- Hidayat, A., Sugiarto, L., & Pujiono, P. (2021). Restoring Social Justice Through Legal Literacy and Digital Ethics after Covid-19 Pandemic in Indonesia. *Proceedings of the 4th International Conference on Indonesian Legal Studies, ICILS 2021, June 8-9 2021, Semarang, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.8-6-2021.2314377>
- Hujo, K., & Fuentes-Nieva, R. (2024). *System Change for Economic Transformation: Toward Fair Fiscal Contracts*. www.unrisd.org
- Idrus, A. (2024). Exploring Public Finance Policies: A Qualitative Inquiry into Fiscal Policy Analysis, Government Financial Management, and Public Sector Financial Health. *Golden Ratio of Finance Management*, 4(2), 87–99. <https://doi.org/10.52970/grfm.v4i2.481>
- Indrawati, S. M., Satriawan, E., & Abdurrohman. (2024). Indonesia's Fiscal Policy in the

- Aftermath of the Pandemic. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 60(1), 1–33. <https://doi.org/10.1080/00074918.2024.2335967>
- Iskandar, A., Diklat, B., Makassar, K., & Pertama, D. (2019). *Informasi Artikel Abstrak Regional Government Spending Efficiency On Health And Education In Decentralization Era: Evidence From Indonesia (Period Of 2010 To 2017)* (Rahmaluddin Saragih 2).
- Judijanto, L. (2025). Adaptive Fiscal Policy: Balancing Economic Stimulus And Budget Sustainability. *International Journal Of Financial Economics (IJEFE)*, 2(6), 602–611.
- Judijanto, L., & Muthalib, D. A. (2025). The Role of Green Fiscal Policy in Supporting Green Governance and Green Economic Development. *Journal of Islamic Economy*, 2(2), 45–52. <https://doi.org/10.62872/seqntv12>
- Kacaribu, F. N., & Crystallin, M. (2025). Maintaining Macroeconomic Stability during the Pandemic. In *Keeping Indonesia Safe from the COVID-19 Pandemic* (pp. 67–105). ISEAS Publishing.
- Kemenkes. (2024). *Laporan Kinerja 2024 Transformasi Berkelanjutan: Transformasi Menuju Indonesia Maju*.
- Khairi, R. F. (2024). Indonesia's Fiscal Policy in the Midst of Recession and Post-Pandemic Recovery Reviewed from an Islamic Fiscal Perspective. In *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* (Vol. 9, Issue 2).
- Lami, E., Imami, D., Pugh, G., & Hashi, I. (2021). Fiscal performance and elections in the context of a transition economy. *Economic Systems*, 45(2), 100886. <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2021.100886>
- Leong, W. Y., Leong, Y. Z., & Leong, W. S. (2024). Green Energy and Social Impacts for ASEAN. *2024 9th International Conference on Applying New Technology in Green Buildings (ATiGB)*, 428–431. <https://doi.org/10.1109/ATiGB63471.2024.10717638>
- Luong, A. T., Nguyen, A. T. P., & Nguyen, Q. T. (2025). Monetary policy spillovers in a fragmented world: the role of geopolitical risk pre- and post-COVID-19 pandemic. *Journal of Economics and Development*, 27(2), 175–191. <https://doi.org/10.1108/JED-06-2024-0195>
- Mahira, D. F., & Karjoko, L. (2024). *Trilemma of Stakeholders in Waste-Based Renewable Energy Management in Indonesia* (pp. 436–440). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-218-7_73
- Mpofu, F. Y. (2023). Digital Entrepreneurship, Taxation of the Digital Economy, Digital Transformation, and Sustainable Development in Africa. In *The Fourth Industrial Revolution in Africa* (pp. 193–219). https://doi.org/10.1007/978-3-031-28686-5_10
- Norrahman, R. A. (2024). Analysis of the Impact of Fiscal Policy on Economic Growth in Indonesia. In *Informasi Artikel Abstract* (Vol. 1, Issue 1). <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jsi>
- OECD. (2024). *OECD Economic Outlook*, (Vol. 2024). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/d8814e8b-en>
- O'Reilly, P., Perret, S., & Dender, K. Van. (2020). COVID-19 and Fiscal Policies: Tax and Fiscal Policy in Response to the Coronavirus Crisis: Strengthening Confidence and Resilience. *Intertax*, 48(Issue 8/9), 736–742. <https://doi.org/10.54648/TAXI2020069>
- Prayoga, A. Y. (2022). Research Trends in Public Budgeting for Half A Century. *Innovation Business Management and Accounting Journal*, 1(4), 104–116. <https://doi.org/10.56070/ibmaj.v1i4.19>
- Pulipaka, Sanjay., Srinivasan, Krishnan., & Mayall, James. (2023). *Power, Legitimacy And World Order: changing contours of preconditions and*. Routledge.
- Purwoko, P., & Wibowo, T. (2020). The Role of Fiscal Policy to Increase Energy Security:

- Indonesian Case Study. *Journal of Clean Energy Technologies*, 8(2), 11–15. <https://doi.org/10.18178/JOCET.2020.8.2.518>
- Putra, N. T. S. A., & Satria, R. (2025a). *Bridging the Gap: Indonesia and the Path to Sustainable Development in the Global South* (pp. 34–63). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-368-9_5
- Putra, N. T. S. A., & Satria, R. (2025b). *Bridging the Gap: Indonesia and the Path to Sustainable Development in the Global South* (pp. 34–63). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-368-9_5
- Putri, D. A., & Najicha, F. U. (2021). Reformasi Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Hukum POSITUM*, 6(2), 168–178.
- Ramesh, S. (2025). The Future of Indonesia's Economy (2024 and beyond). In *The Political Economy of Indonesia's Economic Development, Volume II* (pp. 379–415). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-032-03140-2_12
- Skidelsky, R. (2020). Economic Recovery in the Age of COVID-19. *Intereconomics*, 55(6), 345–349. <https://doi.org/10.1007/s10272-020-0929-6>
- Supriadi, I. (2024). Transformasi Sistem Perpajakan Menggunakan Teknologi Blockchain untuk Meningkatkan Transparansi dan Mengurangi Penyimpangan. *Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting*.
- Trisnantoro, L. (2022). Post-pandemic trajectory of health-reform financing in Indonesia. In *In sickness and in health : diagnosing Indonesia* (p. 252). ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Ulani, S. Y., & Aprirachman, R. (2025). Post-Pandemic Economic Recovery in Indonesia: A Systematic Literature Review on Key Drivers, Challenges, And Policy Implications. *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)*, 12(2), 196–209. <https://doi.org/10.36987/ecobi.v12i2.7148>
- UN ESCAP. (2025). *Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2025*.
- Wahyudi, R., Sondakh, F., Noor, V., & Permatasari, A. R. (2024). *Social Protection Inclusion in Indonesia's Remote Areas Identifying and addressing gaps and challenges*. www.worldbank.org
- Wawan Mulyawan, A., & Alia, W. (2020). APBN DAN PENDAPATAN NASIONAL. *SALAM: Islamic Economics Journal*, 1(2), 59–67.
- Weber, M., Chaiechi, T., & Beg, R. (2022). Inclusive Growth and Climate Change Mitigation Programs and Policies in the ASEAN: Fiscal Implications. *Bulletin of Applied Economics*, 189–220. <https://doi.org/10.47260/bae/9212>
- Weber, M. P. (2025). *Inclusive growth & climate change – a fiscal challenge for the ASEAN*. <https://doi.org/10.25903/n0y3%2Dn215>
- World Bank. (2025). *Global Economic Prospects*.
- Yang, F., & Weiguang, L. (2025). Multi-faceted fiscal research in interdisciplinary and globalization vision. In *State Governance and Public Finance Theory* (pp. 87–100). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003562856-8>
- Yang, Y., Basdevant, O., Benicio, D., Balasundharam, V., Selim, H., Kim, Y., Ceber, A., & Mazzone, L. (2023). Fiscal Consolidation: Taking Stock of Success Factors, Impact, and Design. *IMF Working Papers*, 2023(063), 1. <https://doi.org/10.5089/9798400235221.001>
- Yoganandham, G. (2024). Navigating Global Economic Dynamics: A Macroscopic Analysis of Multilateralism, Recovery, And Fiscal Stability in a Post-Pandemic World. *Degrés*, 9(2).